

SKALA USAHATANI PADI DI BEBERAPA LOKASI LUMBUNG PANGAN DI SUMATRA SELATAN

Yanter Hutapea dan Abdullah Bamualim

*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatra Selatan
Jl. Kol. H. Barlia Km. 6 PO Box 1265, Palembang 30153*

ABSTRACT

The study aimed to determine break even points and minimum scales of economy of rice farming in several rice producing centers in South Sumatra. Survey was conducted from August to October 2002 through interviewing farmers' households in Sido Makmur village, Belitang Subdistrict, Ogan Komering Ulu (OKU) District; Sirah Pulau Padang Village, Sirah Pulau Padang Subdistrict, Ogan Komering Ilir (OKI) District; and Telang Jaya Village, Pembantu Muara Telang Subdistrict, Musi Banyuasin (MUBA) District. Respondents sampling was carried out using a stratified random method on rice barn and non rice barn groups. Each group of each village consisted of 20 farmers. Thus, total respondents were 120 farmers. Results of the study revealed that break even points were 635 kg, 804 kg, and 724 kg of rice production in OKU, OKI, and MUBA Districts, respectively. Minimum scales of economy of rice farming in OKU, OKI, and MUBA districts were 0.25 ha, 0.37 ha, and 0.33 ha, respectively. The farmers did not interest with existence of food barns by delaying rice sale due to insignificant price difference between storage and sale.

Key words: *rice farming, minimum scale of economy, rice barn*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan impas dan skala minimum usahatani padi di beberapa lokasi yang ada lumbung pangan di Sumatra Selatan. Survei dilakukan pada Bulan Agustus-Oktober 2002 dengan mewawancarai rumah tangga petani di Desa Sido Makmur, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU); Desa Sirah Pulau Padang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Desa Telang Jaya, Kecamatan Pembantu Muara Telang, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA). Pengambilan sampel dilakukan secara acak berlapis yaitu pada kelompok lumbung pangan dan bukan lumbung pangan masing-masing sebanyak 20 petani sehingga secara keseluruhan dibutuhkan sampel sebanyak 120 petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara agregat titik impas tercapai pada produksi beras sebesar 635 kg di Kabupaten OKU, dan 804 kg di Kabupaten OKI serta 724 kg di Kabupaten MUBA. Skala minimum usahatani padi di Kabupaten OKU seluas 0,25 ha, di Kabupaten OKI seluas 0,37 dan di Kabupaten MUBA seluas 0,33 ha. Pada keberadaan lumbung pangan, harga belum merupakan suatu hal yang menarik bagi petani untuk melakukan kegiatan tunda jual karena tidak ada perbedaan harga yang menyolok pada saat menyimpan dengan saat menjual.

Kata kunci : *usahatani padi, skala minimum, lumbung pangan*

PENDAHULUAN

Lebih spesifik dibanding provinsi lainnya di Indonesia, Sumatra Selatan memiliki sawah yang terdiri dari berbagai tipologi seperti irigasi (teknis, setengah teknis, sederhana, desa),

tadah hujan, pasang surut dan lebak. Data menunjukkan bahwa luas panen padi sawah pada tahun 2001 di Sumatra Selatan adalah 432.574 ha dan padi ladang adalah 72.765 ha dengan produksi padi sawah sebesar 1.532.092 ton dan padi ladang sebesar 152.568 ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Selatan, 2002). Sebagai

penghasil beras nomor tujuh di Indonesia, diharapkan Sumatra Selatan menjadi andalan sebagai pemasok beras bagi provinsi lain.

Adanya lonjakan harga beras periode Desember 2001 sampai awal 2002 telah menarik perhatian pengamat. Hal ini memang tidak mengherankan karena beras merupakan makanan pokok 95 persen penduduk Indonesia. Ketika harga beras tiba-tiba meningkat, semua potensi dikerahkan untuk mengembalikan harga pada keadaan semula baik melalui operasi pasar, penyaluran beras untuk keluarga miskin, bahkan pemberlakuan jalur hijau bagi impor beras. Namun sebaliknya, ketika harga gabah anjlok di musim panen raya seolah tidak ada satu instrumen pun yang dapat membantu petani (Agribisnis Indonesia, 2002). Hal ini diperparah lagi oleh banyaknya usahatani padi yang dilakukan dalam skala kecil yakni di bawah 0,5 ha atau petani gurem. Tidak mengherankan, karena ketika petani beranak-pinak maka terjadi fragmentasi tanah akibat sistem pewarisan sehingga pemilikan lahan semakin sempit. Selain itu juga diakibatkan oleh transaksi jual-beli.

Dari data Sensus Pertanian 1983 dan 1993 jumlah petani berlahan sempit (di bawah 0,5 ha) meningkat dengan laju 1,4 persen/tahun dan buruh tani meningkat 6 persen/tahun. Sebanyak 51 persen adalah petani gurem (Kasryno, 2000). Sebagai konsekuensi dari rendahnya skala usaha ini maka penerimaan dari usahatani padi menjadi sangat rendah. Hasil penelitian Rachman (1987) menyatakan bahwa petani dengan lahan garapan sempit cenderung menerima keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan lahan garapan luas.

Petani menggarap lahan yang relatif sempit umumnya tidak efisien dalam sistem usahatannya, terlebih bila ia memproduksi tanaman yang harganya tidak tinggi. Agar efisien sebaiknya petani menggarap lahan yang lebih luas. Luas lahan yang optimal sangat tergantung pada jenis tanaman serta harga masukan dan luaran. Diharapkan dengan menggarap lahan yang lebih luas, pendapatan petani akan lebih besar. Indraningsih dan Noekman (1995) menga-

takan bahwa pendapatan rumah tangga tani dapat dipandang memiliki hubungan fungsional dengan penguasaan dan pengusahaannya atas berbagai aset produktif yaitu: lahan pertanian, modal dan tenaga kerja. Di samping itu penguasaan petani terhadap teknologi akan turut membedakan kemampuannya dalam meraih pendapatan.

Melalui kebijakan yang ada di bidang pertanian, pemerintah terus mengupayakan untuk meningkatkan produksi beras. Bahkan dalam berbagai kondisi, baik saat panen maupun musim paceklik, harga beras diupayakan tetap dapat terjangkau oleh masyarakat namun harga tersebut juga dapat memberi insentif yang wajar bagi petani produsen sebagai salah satu cara menjamin pendapatan yang layak bagi petani. Dalam menunjang hal tersebut salah satu kegiatan yang dilaksanakan belakangan ini adalah upaya untuk menghidupkan lumbung pangan masyarakat desa terutama untuk menampung gabah petani dan dijual pada saat persediaan beras di pasaran menipis atau pada saat harga beras lebih baik.

Berdasarkan keadaan tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui titik impas, skala minimum usahatani padi di beberapa lokasi yang ada lumbung pangan di wilayah Sumatra Selatan.

METODE PENELITIAN

Pengambilan data dilakukan melalui survei pada bulan Agustus-Oktober 2002. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan kriteria agar desa yang terpilih dapat mewakili salah satu agroekosistem (irigasi, lebak dan pasang surut) di samping juga memiliki lumbung pangan. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) masing-masing terpilih mewakili agroekosistem irigasi, lebak dan pasang surut. Dari ketiga kabupaten tersebut dipilih secara sengaja satu kecamatan yang terluas penanaman padi sawahnya, mewakili agroekosistem yang ditentukan, dan memiliki lumbung pangan. Oleh karena itu desa-

desa yang terpilih adalah (1) Desa Sido Makmur, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU, (2) Desa Sirah Pulau Padang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten OKI dan (3) Desa Telang Jaya, Kecamatan Pembantu Muara Telang, Kabupaten MUBA sebagai desa sampel. Dari tiap-tiap desa dipilih secara acak berlapis (*stratified random sampling*) sebanyak 20 rumah tangga sebagai anggota lumbung pangan dan 20 lainnya bukan anggota, sehingga secara keseluruhan terpilih 120 rumah tangga sampel.

Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap rumah tangga petani. Data tersebut meliputi: jumlah anggota keluarga, macam mata pencaharian, luas lahan yang diusahakan, sarana produksi yang digunakan, biaya produksi, produksi fisik dari berbagai jenis usahatani yang diusahakan, harga produksi per satuan fisik, pendapatan luar pertanian, pengeluaran keluarga untuk pangan dan non pangan.

Data diolah secara tabulasi, dianalisis secara deskriptif. Analisis statistik (uji-t) dilakukan untuk melihat perbedaan: biaya total/ha, produksi beras/ha, penerimaan/ha dan pendapatan usahatani padi/ha antara anggota dan bukan anggota lumbung. Untuk mengetahui titik impas (Sjarkowi dan Bakir, 1994) digunakan rumus: Titik impas = Biaya tetap : (Harga – Biaya variabel rata-rata). Selanjutnya nilai skala minimum usahatani padi dicari dengan cara sebagai berikut: Skala minimum usaha = Titik impas : produksi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Rumah Tangga Petani

Kondisi rumah tangga petani di daerah penelitian menunjukkan bahwa rata-rata umur kepala keluarga (KK) di Kabupaten OKU adalah 40,6 tahun dengan kisaran 22–81 tahun dengan umur ibu rumah tangga 36,7 tahun dengan kisaran 20–70 tahun. Di Kabupaten OKI rata-rata umur kepala keluarga adalah 46 tahun dengan kisaran 27–63 tahun, dengan umur ibu rumah tangga adalah 41 tahun dengan kisaran 25–60

tahun. Di Kabupaten MUBA umur kepala rumah tangga adalah 47,8 tahun dengan kisaran 24–70 tahun, umur ibu rumah tangganya adalah 41 tahun dengan kisaran 20–60 tahun. Secara rata-rata maka baik kepala keluarga maupun ibu rumah tangga umumnya berada pada usia kerja yang produktif (25-59 tahun). Kisaran jumlah anggota keluarga di Kabupaten OKU adalah 2-7 orang, di Kabupaten OKI 3-10 orang dan di Kabupaten MUBA 3-8 orang (Tabel 1).

Tabel 1. Karakteristik Rumah Tangga Usahatani Padi di Kabupaten OKU, OKI dan MUBA, 2002

Uraian	OKU	OKI	MUBA
Umur kepala keluarga (tahun)	40,6	46,0	47,8
Umur istri (tahun)	36,7	41,0	41,0
Jumlah anggota keluarga (orang)	4,0	5,0	5,0
Luas penguasaan lahan (ha)	0,93	1,0	2,23
Luas kebun (ha)	0,17	0,06	0,03
Luas pemilikan sawah (ha)	0,69	0,62	2,18
Luas sawah disewa (ha)	0,05	0,31	0,02
Luas panen padi (ha)	1,50	0,93	2,21

Kepastian atas penguasaan lahan merupakan salah satu unsur penting bagi petani dalam mengelola lahan. Masyarakat cenderung masih menghendaki hak milik dari pada bentuk lain dalam penguasaan lahan. Secara agregat penguasaan lahan rata-rata di Kabupaten OKU, OKI dan MUBA berturut-turut 0,93; 1,0 dan 2,23 ha yang terdiri dari lahan kebun, sawah milik dan sawah yang disewa. Penanaman padi sawah di Kabupaten OKU dilakukan 2 kali/tahun dengan luas panen 1,5 ha/th. Sedangkan di Kabupaten MUBA meskipun sekali ditanam dalam satu tahun luas panen padi sawahnya terluas yakni 2,21 ha/th dan di Kabupaten OKI luas panennya 0,93 ha/th.

Analisis Usahatani Padi

Di Kabupaten OKI cukup banyak ditemukan rumah tangga petani yang menyewa lahan sawah orang lain yakni 35 persen. Namun sebaliknya di Kabupaten MUBA hampir tidak ada responden yang menyewa lahan sawah orang lain (2,5%), sedangkan di Kabupaten OKU sebanyak 12,5 persen responden menyewa sawah orang lain. Dari segi penggunaan sarana produksi, di Kabupaten OKI jarang sekali petani menggunakan pupuk. Sebaliknya di Kabupaten OKU dan MUBA cukup banyak petani yang telah menggunakan pupuk untuk tanaman padinya. Di Kabupaten OKU petani menanam padi dua kali dalam setahun sedangkan di Kabupaten OKI dan MUBA hanya satu kali saja, sehingga luas panen padi rata-rata rumah tangga petani (termasuk yang disewa) berdasarkan hasil survei menjadi 1,5 ha di Kabupaten OKU; 0,93 ha di Kabupaten OKI dan 2,21 ha di Kabupaten MUBA. Hal-hal tersebut tentunya juga mempengaruhi variasi besarnya biaya yang dikeluarkan.

Analisis usahatani dilakukan dengan melihat rata-rata agregat di masing-masing kabupaten tanpa memisahkannya antara anggota dan bukan anggota lumbung pangan. Rata-rata pemilikan sawah di Kabupaten OKU seluas 0,69 ha dengan kisaran 0,18–2 ha, di Kabupaten OKI seluas 0,62 ha dengan kisaran 0,5–1,5 ha, sedangkan di Kabupaten MUBA rata-rata seluas 2,18 ha dengan kisaran 1–4 ha. Petani di

Kabupaten OKU dan MUBA adalah transmigran sedangkan di Kabupaten OKI adalah penduduk asli setempat.

Selama kegiatan usahatani berlangsung dibutuhkan masukan yang sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Menurut Boediono (1982) pengelompokan masukan ke dalam dua jenis ini hanyalah untuk mempermudah perhitungan dan berlaku dalam jangka pendek. Biaya variabel pada analisis ini meliputi biaya untuk pembelian benih, pupuk, pestisida, karung dan upah tenaga kerja baik prapanen (pengolahan tanah; penanaman; pemupukan; pengendalian hama, penyakit dan gulma); panen, merontok; pengangkutan maupun pasca panen (menjemur dan menggiling). Sedangkan biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan alat, pajak sawah, iuran air, sumbangan lain yang terkait dengan usahatani padi, biaya sewa dan bunga atas modal yang dalam hal ini diperhitungkan 20 persen per tahun. Perhitungan bunga dalam satu kali tanam dinilai dari besarnya biaya variabel dikalikan 8,33 persen karena dibutuhkan waktu selama 5 bulan dalam satu periode tanam mulai persiapan lahan sampai pasca panen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya total usahatani padi di Kabupaten OKU sebesar Rp 3.751.720/ha sedangkan di OKI sebesar Rp 2.862.178/ha dan Rp 3.354.966/ha di MUBA. Biaya rata-rata untuk menghasilkan satu kg beras berturut-turut di Kabupaten OKU, OKI dan

Tabel 2. Analisis Usahatani Padi per ha di Kabupaten OKU, OKI dan MUBA, 2002

Uraian	OKU	OKI	MUBA
Biaya variabel (Rp)	3.304.382	2.579.554	3.061.909
Biaya tetap (Rp)	447.338	526.347	293.057
Biaya total (Rp)	3.751.720	2.862.178	3.354.966
Biaya rata-rata (Rp/kg)	1.403	1.348	1.482
Biaya variabel rata-rata (Rp/kg)	1.239	1.128	1.352
Produksi beras (kg)	2.722	2.379	2.285
Harga beras (Rp/kg)	2.000	1.800	1.800
Penerimaan (Rp)	5.443.305	4.283.169	4.113.082
Pendapatan (Rp)	1.691.585	1.177.267	758.117
Titik impas (kg)	635	804	724
Skala minimum usaha (ha)	0,25	0,37	0,33

Sumber: Hasil penelitian diolah

Skala Usahatani Padi di Beberapa Lokasi Lumbung Pangan di Sumatera Selatan (Yanter Hutapea dan Abdullah Bamualim)

Kabupaten MUBA sebesar Rp 1.403; Rp 1.348 dan Rp 1.482. Biaya rata-rata ini menunjukkan harga pokok atau titik impas harga/kg beras. Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi beras di Kabupaten OKU sebesar 2.722 kg/ha, di OKI sebesar 2.379 kg/ha sedangkan di MUBA 2.285 kg/ha.

Harga jual beras di penggilingan berdasarkan hasil wawancara sebesar Rp 1.800/kg di Kabupaten OKI dan MUBA sedangkan di OKU sebesar Rp 2.000 /kg. Pendapatan usahatani di Kabupaten OKU sebesar Rp 1.691.585/ha, sedangkan di OKI dan MUBA masing-masing sebesar Rp 1.177.267/ha dan Rp 758.117/ha.

Usahatani padi di Kabupaten OKU, OKI dan MUBA mencapai keadaan impas masing-masing pada produksi beras 635 kg/ha; 804 kg/ha dan 724 kg/ha. Dengan titik impas tersebut maka skala minimum usahatani padi di Kabupaten OKU sebesar 0,25 ha, di Kabupaten OKI 0,37 ha dan di Kabupaten Muba 0,33 ha. Hal ini menunjukkan bahwa pada skala minimum tersebut tercapai keadaan dimana pengeluaran usahatani padi sama besar dengan penerimannya. Agar diperoleh keuntungan maka usahatani yang diusahakan harus lebih luas dari skala minimum tersebut.

Bila dijabarkan lebih lanjut dalam kaitannya dengan batas garis kemiskinan di pedesaan sebesar 320 kg beras per kapita per tahun (Sajogjo, 1999), dengan asumsi petani menggantungkan hidupnya hanya dari usahatani padi saja maka skala minimum usahatani padi di Kabupaten OKU seluas 0,49 ha, di Kabupaten OKI 0,73 ha dan di Kabupaten MUBA seluas 0,72 ha. Dengan demikian untuk hidup di atas garis kemiskinan maka rumah tangga petani haruslah mengusahakan sawah lebih besar dari angka-angka tersebut. Kenyataan menunjukkan di Kabupaten OKU ada pengusaha sawah di bawah 0,49 ha yakni yang dilakukan oleh 40 persen rumah tangga responden. Di Kabupaten OKI terdapat 65 persen responden yang mengusahakan sawah di bawah 0,73 ha, dengan demikian responden perlu mengusahakan sawahnya di atas skala minimum bila ditinjau dengan batas

garis kemiskinan ini. Sedangkan di Kabupaten MUBA rumah tangga responden menggarap sawah minimal 1 ha sehingga tidak ada responden yang menggarap di bawah skala minimum.

Untuk mencegah agar lahan usahatani padi tidak berada di bawah skala minimum atau tidak semakin mengecil ukuran pemilikannya, maka hendaknya dilakukan suatu upaya meninjau ulang sistem pewarisan. Pada keluarga tani yang memiliki dua anak atau lebih yang akan diwariskan tanah tersebut maka perlu diupayakan kesepakatan agar pengelolaan lahan tersebut oleh satu keluarga saja.

Untuk lahan-lahan yang luasnya sudah di bawah batas minimum perlu dibentuk suatu wadah atau kelompok yang terdiri dari beberapa orang petani. Hal ini merupakan upaya pemberdayaan yang menggunakan usaha kelompok untuk memenuhi skala usaha ekonomis yang dikelola secara profesional. Jadi dalam proses produksi kegiatan-kegiatannya dikelola bersama oleh kelompok. Karena wadah atau kelompok ini merupakan kumpulan dari orang-orang maka kemampuan yang dihimpun tentunya menjadi lebih besar. Sehingga baik dari tenaga maupun dana yang terhimpun dapat dilakukan usaha yang tidak terbatas pada usaha pokok produksi pangan melainkan juga pada kegiatan lain yang terkait maupun yang tidak terkait dengan usahatani pokok. Pola dimaksud mengarah pada usahatani korporasi (*corporate farming*).

Bila dibandingkan antara anggota dan bukan anggota lumbung pangan, maka di Kabupaten OKU justru biaya total/ha, produksi beras/ha, penerimaan dan pendapatan/ha bukan anggota lumbung lebih tinggi dibanding anggota lumbung. Hasil pengujian statistik (uji-t) menunjukkan antara anggota dan bukan anggota lumbung pangan di Kabupaten OKU tidak ada perbedaan yang nyata baik pada biaya total/ha, produksi beras/ha, pendapatan usahatani padi/ha, titik impas dan skala minimum usahatani padi. Di Kabupaten OKI perbedaan nyata terdapat pada biaya total/ha, titik impas dan skala minimum usahatani padi sedangkan di Kabupaten MUBA

perbedaan yang nyata hanya terdapat pada biaya total/ha (Lampiran 1 sampai 3).

Lumbung Pangan dan Kaitannya dengan Harga Jual Beras

Diakui bahwa keberadaan lumbung pangan hanya dirasakan oleh segelintir keluarga petani saja karena kapasitas lumbung desa hanya mampu menampung 30-40 ton gabah kering giling. Namun keberadaan lumbung memang dapat memupuk rasa kebersamaan/kekompakan sesama anggota. Untuk meningkatkan penyimpanan beras di lumbung maka hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dan jumlah lumbung; memfungsikan beberapa fasilitas bangunan yang ada di lingkungan desa, misalnya gudang KUD yang tidak terpakai lagi, sehingga menghemat dana pemerintah untuk membangun lumbung pangan. Selain itu juga perlu digalakkan kembali lumbung keluarga di rumah masing-masing. Hal ini perlu dilakukan mengingat daya tampung gudang Dolog yang terbatas sehingga terbatas kemampuannya dalam membeli beras petani juga terbatas sehingga menyebabkan jatuhnya harga beras.

Untuk mendukung penyimpanan beras di lumbung, pemerintah harus menyediakan lembaga yang mampu menjamin harga yang layak agar petani tertarik untuk menyimpan gabah. Sebagai syarat gabah yang diterima di lumbung adalah dengan kadar air di bawah 15 persen. Dengan kadar air tersebut mutu dapat dipertahankan sehingga gabah yang dilumbungkan harus benar-benar berkualitas baik.

Di Kabupaten OKU pada musim hujan, panen berlangsung di bulan Januari–Februari, di musim kemarau, panen berlangsung pada bulan Juli–Agustus. Di Kabupaten OKI panen berlangsung pada bulan Agustus–September. Sedangkan di Kabupaten MUBA panen berlangsung pada bulan Maret–April. Ditinjau dari sisi harga jual, maka kegiatan tunda jual tampaknya belum menjamin adanya keuntungan bagi petani karena belum adanya perbedaan harga yang menyolok antara masa panen dengan di luar musim panen.

Hal ini ditunjukkan oleh kecilnya fluktuasi pada harga beras bulanan (Lampiran 4). Pada tahun 2001, perkembangan harga eceran beras di tingkat konsumen relatif konstan. Ini diperlihatkan oleh data harga eceran beras di tingkat konsumen di Kota Baturaja (Kabupaten OKU), Kota Kayu Agung (Kabupaten OKI) dan Kota Sekayu (Kabupaten MUBA) seperti yang disajikan pada Lampiran 4. Hal ini tentunya sudah menunjukkan bahwa harga belum merupakan suatu hal yang menarik bagi petani untuk melakukan kegiatan tunda jual karena harga pada saat menyimpan dengan harga di saat menjual relatif sama. Untuk itu diperlukan adanya lembaga yang dapat menjamin selisih harga pada saat menyimpan dan harga saat menjual agar ada nilai tambah dengan menyimpan gabah di lumbung.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Secara agregat tingkat produksi usahatani padi/ha di Kabupaten OKU, OKI dan MUBA berturut-turut sebesar 2.722 kg beras, 2.379 kg beras dan 2.285 kg beras. Titik impas tercapai pada produksi beras sebesar 635 kg di Kabupaten OKU, dan 804 kg di Kabupaten OKI serta 724 kg di Kabupaten MUBA.
2. Untuk mencapai keadaan impas maka skala minimum usahatani padi di Kabupaten OKU seluas 0,25 ha, di Kabupaten OKI seluas 0,37 ha dan di Kabupaten MUBA seluas 0,33 ha. Bila dikaitkan dengan batas garis kemiskinan sebesar 320 kg beras/kapita/tahun dengan asumsi pendapatan petani hanya bersumber pada usahatani padi maka skala minimum usahatani padi di Kabupaten OKU, OKI dan MUBA berturut-turut sebesar 0,49 ha; 0,73 ha dan 0,72 ha. Ini berimplikasi pada perlunya dibentuk wadah atau kelompok yang beranggotakan petani-petani tersebut untuk memberdayakan mereka melakukan kegiatan secara berkelompok yang dikelola secara profesional ke arah usahatani koperasi (*cooperative farming*).

3. Harga pada saat menyimpan dengan harga di saat menjual relatif sama. Dengan demikian harga belum merupakan suatu hal yang menarik bagi petani untuk melakukan kegiatan tunda jual. Implikasinya adalah pemerintah perlu menyediakan lembaga yang mampu menjamin harga yang layak agar petani tertarik untuk menyimpan gabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agribisnis Indonesia. 2002. Beras dari Masalah ke Masalah. Majalah Agribisnis Indonesia. Volume 19.
- Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan. 2002. Sumatra Selatan dalam Angka 2001. Palembang.
- Boediono, 1982. Ekonomi Mikro. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Indraningsih, K.S dan K. M. Noekman, 1995. Identifikasi penduduk miskin di Jawa Timur. *Dalam* Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian Kemiskinan di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya. Buku 2. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Kasryno, F. 2000. Sumber daya manusia dan pengelolaan lahan pertanian di pedesaan Indonesia. FAE. Vol. 18 No. 1 dan 2. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Bogor.
- Rachman, H.P.S, 1987. Pendugaan skala usaha usahatani padi sawah dengan fungsi keuntungan. JAE. Vol. 6 No. 1 dan 2. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Sajogjo, 1990. Sosiologi Pedesaan. Erlangga, Jakarta.
- Sjarkowi, F dan L. Bakir. 1994. Manajemen Agribisnis. Universitas Sriwijaya, Palembang.

Lampiran 1. Rata-rata Nilai Beberapa Komponen Pengamatan Usahatani Padi di Kabupaten OKU, 2002

Uraian	Anggota lumbung	Bukan anggota lumbung	Selisih nilai	Tanpa pengelompokan
Biaya total (Rp/ha)	3.743.820	3.759.619	15.799 tn	3.751.720
Produksi beras (kg/ha)	2.657	2.786	129 tn	2.722
Penerimaan (Rp/ha)	5.314.478	5.572.132	257.654 tn	5.443.305
Pendapatan (Rp/ha)	1.570.657	1.812.512	241.855 tn	1.691.585
Titik impas (kg)	701	570	131 tn	635
Skala minimum (ha)	0,27	0,21	0,06 tn	0,25

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata (probabilitas > 0,05)

Lampiran 2. Rata-rata Nilai Beberapa Komponen Pengamatan Usahatani Padi di Kabupaten OKI, 2002

Uraian	Anggota lumbung	Bukan anggota lumbung	Selisih nilai	Tanpa pengelompokan
Biaya total (Rp/ha)	3.419.053	2.792.750	626.303 *	2.862.178
Produksi beras (kg/ha)	2.483	2.276	208 tn	2.379
Penerimaan (Rp/ha)	4.470.145	4.096.192	373.953 tn	4.283.169
Pendapatan (Rp/ha)	1.051.092	1.303.442	252.350 tn	1.177.267
Titik impas (kg)	1.068	540	528 *	801
Skala minimum (ha)	0,46	0,27	0,19 *	0,37

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata (probabilitas > 0,05)

* = berbeda nyata (probabilitas < 0,05)

Lampiran 3. Rata-rata Nilai Beberapa Komponen Pengamatan Usahatani Padi di Kabupaten MUBA, 2002

Uraian	Anggota lumbung	Bukan anggota lumbung	Selisih nilai	Tanpa pengelompokan
Biaya total (Rp/ha)	3.258.177	3.451.754	193.577 *	3.354.966
Produksi beras (kg/ha)	2.241	2.329	88 tn	2.285
Penerimaan (Rp/ha)	4.033.485	4.192.680	159.195 tn	4.113.082
Pendapatan (Rp/ha)	775.308	740.925	34.383 tn	758.116
Titik impas (kg)	716	732	16 tn	724
Skala minimum (ha)	0,34	0,32	0.02 tn	0,33

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata (probabilitas > 0,05)

* = berbeda nyata (probabilitas < 0,05)

Skala Usahatani Padi di Beberapa Lokasi Lumbung Pangan di Sumatera Selatan (Yanter Hutapea dan Abdullah Bamualim)

Lampiran 4. Harga Eceran Rata-Rata Beras Kualitas Sedang (Rp/Kg) di Beberapa Kota di Sumatra Selatan, 2001

Bulan	Baturaja (Kab. OKU)	Kayu Agung (Kab. OKI)	Sekayu (Kab. MUBA)
Januari	2.300	2.250	2.600
Pebruari	2.400	2.300	2.700
Maret	2.425	2.500	2.700
April	2.125	2.400	2.700
Mei	2.100	2.400	2.600
Juni	2.100	2.250	2.600
Juli	2.100	2.250	2.600
Agustus	2.200	2.300	2.700
September	2.200	2.300	2.700
Oktober	2.650	2.300	2.775
November	2.700	2.500	2.900
Desember	2.700	2.700	2.900

Sumber: BPS Provinsi Sumatra Selatan, 2002.